

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Penerapan Fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa Kecamatan Hiliserangkai, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Fungsi Perencanaan

Penerapan fungsi perencanaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa telah mengikuti prosedur formal sesuai ketentuan perundangan, melalui tahapan penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang dilaksanakan dalam Musyawarah Desa (Musdes). Namun, secara substansi, perencanaan masih menghadapi kendala rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa, serta kurangnya penggunaan data sebagai dasar perencanaan. Hal ini berdampak pada belum optimalnya relevansi program dengan kebutuhan nyata masyarakat dan memunculkan program yang kurang prioritas.

2. Penerapan Fungsi Pengorganisasian

Struktur organisasi pengelolaan Dana Desa telah terbentuk dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas secara dokumen. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan seperti tumpang tindih pekerjaan, lemahnya koordinasi antarperangkat desa, dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis yang rinci. Kondisi ini berimplikasi pada terjadinya keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan belum tercapainya efisiensi kerja secara maksimal.

3. Penerapan Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan program Dana Desa telah berjalan sesuai jadwal dan ketentuan administratif, namun efektivitas dan efisiensi masih belum optimal. Beberapa program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas yang kurang mendesak dibanding kebutuhan infrastruktur utama.

Pelibatan tenaga kerja lokal juga belum maksimal sehingga potensi peningkatan ekonomi desa dan rasa memiliki warga terhadap hasil pembangunan masih rendah.

4. Penerapan Fungsi Pengawasan

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa telah dilakukan oleh Kepala Desa, BPD, dan Pendamping Lokal Desa, namun masih didominasi oleh pemeriksaan administratif dan pelaporan keuangan. Pengawasan lapangan terkait kualitas pekerjaan dan kesesuaian manfaat program belum dilakukan secara intensif. Monitoring lebih banyak dilakukan di akhir kegiatan sehingga masalah di lapangan sering baru teridentifikasi setelah kegiatan selesai. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga masih rendah karena belum adanya mekanisme pengawasan partisipatif yang terstruktur.

5. Kendala dan Solusi

Kendala utama dalam penerapan fungsi manajemen meliputi rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, keterbatasan kapasitas SDM aparatur desa, koordinasi internal yang belum optimal, serta lemahnya sistem pengawasan lapangan. Adapun solusi yang telah dilakukan meliputi pelatihan dan pembinaan aparatur desa, peningkatan sosialisasi program kepada masyarakat, penguatan koordinasi internal melalui rapat rutin, serta pembentukan tim pengawas lapangan yang melibatkan perangkat desa, BPD, PLD, dan tokoh masyarakat. Keberhasilan solusi tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan dukungan seluruh pemangku kepentingan desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Lawa-Lawa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengawasan

Pemerintah desa perlu mengembangkan strategi partisipasi yang lebih

inklusif, seperti penyelenggaraan Musyawarah Desa pada waktu yang fleksibel, penggunaan media sosial untuk menjangkau aspirasi, dan melibatkan kelompok rentan (perempuan, pemuda, dan warga miskin) agar perencanaan benar-benar merefleksikan kebutuhan seluruh masyarakat. Pemerintah desa bersama pihak terkait (Dinas PMD atau lembaga pendamping) perlu mengadakan pelatihan rutin mengenai perencanaan berbasis data, manajemen keuangan desa, dan pengawasan teknis. Selain itu, perlu dilakukan pembinaan khusus bagi perangkat desa baru agar cepat beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknis

SOP yang jelas perlu disusun untuk setiap fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. SOP ini akan menjadi acuan kerja yang dapat mengurangi tumpang tindih tugas, memperjelas alur koordinasi, dan mempermudah evaluasi kinerja. Rapat koordinasi internal antarperangkat desa, BPD, dan tim pelaksana kegiatan perlu dilakukan secara berkala, minimal sekali dalam sebulan. Agenda rapat tidak hanya membahas progres pekerjaan, tetapi juga meninjau kendala teknis dan mencari solusi bersama secara cepat.

3. Penguatan Sistem Pengawasan Lapangan

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemeriksaan dokumen administrasi, tetapi juga harus melibatkan pengecekan langsung di lapangan. Pemerintah desa dapat membentuk tim monitoring gabungan yang melibatkan masyarakat, BPD, dan PLD untuk memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Dan Evaluasi menyeluruh perlu dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa. Hasil evaluasi harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan sebagai bahan perbaikan di tahun berikutnya.

4. Efisiensi Penggunaan anggaran

Pemerintahan desa lawa-lawa sebaiknya lebih selektif dalam menetapkan prioritas program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan

setiap anggaran dari dana desa bebar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan memperluas kajian dengan menambahkan variabel seperti transparansi, akuntabilitas dan good governance agar analisis lebih komprehensif serta dapat dibandingkan antar desa.